

Judul : Postur RAPBN 2019: Subsidi Berkurang, BBM Berpeluang Naik
Tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2018
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 3

► POSTUR RAPBN 2019

Subsidi Berkurang, BBM Berpeluang Naik

JAKARTA — Penetapan subsidi energi sebesar Rp159,9 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 dari Rp164 triliun mengindikasikan pemerintah menyediakan ruang penyesuaian harga bahan bakar minyak pada tahun depan.

Hadiah Alaydrus & Puput Ady Sukarno
redaksi@bisnis.com

Direktur CORE Indonesia M. Faisal menuturkan subsidi energi sebesar Rp159,9 triliun tidak akan cukup untuk menutupi subsidi energi, terutama dengan memperhitungkan semakin tingginya harga minyak dunia tahun depan.

"Dengan demikian artinya secara tidak langsung pemerintah sudah merencanakan untuk kembali melepas sebagian subsidi BBM yang secara di-cover," ujar Faisal kepada *Bisnis*, Jumat (19/10).

Artinya, dia menambahkan, harga BBM subsidi yaitu solar dapat meningkat tahun depan.

Rapat Panitia Kerja A Badan Anggaran DPR RI menetapkan anggaran pengelolaan subsidi pada postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 mencapai Rp224,3 triliun. Anggaran itu terbagi atas subsidi energi Rp159,9 triliun dan juga subsidi nonenergi Rp64,3 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menerangkan bahwa besaran anggaran subsidi Rp224,3 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4,1 triliun dibandingkan dengan hasil kesepakatan pada raker postur sebelumnya yang dipatok Rp228,4 triliun.

"Penurunan terjadi pada alokasi dana subsidi untuk pos subsidi energi dari Rp164,0 triliun menjadi Rp159,9 triliun,

► Secara tidak langsung pemerintah sudah merencanakan untuk kembali melepas sebagian subsidi BBM dengan menaikkan harga.

sedangkan alokasi untuk subsidi non-energi tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp64,3 triliun," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (18/10) petang.

Penyesuaian subsidi energi sebesar Rp4,1 triliun dengan rincian subsidi BBM dan LPG sebesar Rp3,1 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp1 triliun.

Adapun besaran dana subsidi energi Rp4,1 triliun tersebut dialokasikan pada dana cadangan belanja mendesak, yang meningkat menjadi Rp18,5 triliun, berubah dari hasil rapat kerja sebelumnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diusulkan Rp14,4 triliun.

"Dana cadangan mendesak sebesar Rp18,5 triliun akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NTB dan Sulteng sebesar Rp5 triliun, lalu *pooling fund* bencana alam sebesar Rp1 triliun, dan juga selebihnya untuk cadangan belanja mendesak kementerian/lembaga sebesar Rp12,5 triliun," terangnya.

Adapun pemanfaatan dana cadangan mendesak sebesar Rp12,5 triliun itu direncanakan untuk Kemenhan Rp500 miliar, Polri Rp8,45 triliun, Kemenkumham Rp200 miliar, Kejaksaan RI Rp200 miliar, BIN Rp2,5 triliun, dan juga BSSN sebesar Rp650 miliar.

Menurut Askolani, meskipun dana cadangan mendesak itu memang lebih banyak digunakan untuk belanja di K/L, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dimanfaatkan untuk yang lain.

"Memang dana cadangan mendesak itu untuk K/L. Tapi kemudian kalau nanti beranda-anda, tiba-tiba subsidi harus *nambah*, bisa saja untuk itu. Jadi memang itu fleksibel. Kalau ditanya dari mana sumbernya bisa saja dari PNPB. Jadi kalau penerimaan naik kan enggak kami tolak, kami terima. Makanya bisa sebagian

kita pakai, dengan parameter ditetapkan," jelasnya.

Sementara itu, hasil rapat Panja A Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati besaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.634,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp778,9 triliun.

Besaran belanja pemerintah pusat tersebut mengalami perubahan dari pada hasil raker postur sementara RAPBN 2019 yang telah disepakati sehari sebelumnya sebesar Rp1.635,3 triliun atau terjadi penurunan sebesar Rp990 miliar.

Askolani mengatakan bahwa usulan belanja pemerintah pusat pada rapat panja yang diajukan pemerintah memang mengalami penurunan sebesar Rp990 miliar karena dialihkan untuk Dana Abadi Penelitian.

Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid mengatakan, setelah disepakatinya kebijakan umum belanja yang panita kerja belanja pusat tersebut, akan dilanjutkan dengan pembentukan tim perumus untuk pembahasan rumusan belanja pusat pada pekan depan.

KURANG SIGNIFIKAN

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai bahwa pemerintah sebaiknya memang harus memotong besaran subsidi, terutama subsidi energi pada RAPBN 2019 untuk menyelamatkan defisit transaksi berjalan.

Apalagi, lanjutnya, di tengah semakin besarnya permintaan terhadap BBM, subsidi yang berdampak pada peningkatan disparitas harga, dapat menyebabkan aksi penyelundupan maupun migrasi pengguna dari BBM non-subsidi ke subsidi.

Fithra melihat bahwa penurunan subsidi energi sebesar Rp4,1 triliun dari pada postur sementara RAPBN 2019 yang disepakati pemerintah dan Banggar belum lama ini dinilai masih kurang signifikan dan seharusnya masih bisa ditambah lagi.

Menurutnya, dengan penurunan subsidi

Postur RAPBN 2019

Pemerintah pada tahun depan bakal mengurangi belanja subsidi energi. Pemangkasan subsidi energi dialokasikan pada dana cadangan belanja mendesak, seperti pes untuk penanganan bencana alam. Berikut ini secara lengkap postur RAPBN 2019



Uraian	Raker Postur (Rp miliar)	Kesepakatan Panja* (Rp miliar)
1. Belanja K/L	840.519	855.445
2. Belanja non K/L	794.809	778.893
a. Pengelolaan utang negara	275.885	275.885
- Dalam negeri	255.844	255.844
- Luar negeri	20.040	20.040
b. Pengelolaan hibah negara	1.940	1.940
c. Pengelolaan subsidi	228.440	224.320
- Energi	164.091	159.971
- Non energi	64.349	64.349
d. Pegelolaan belanja lainnya	162.515	150.719
e. Pengelolaan transaksi khusus	126.027	126.027
Jumlah	1.635.329	1.634.339

Ket: *18 Oktober 2018, Jumlah belanja pemerintah pusat berkurang Rp990 miliar, untuk Dana Abadi Penelitian. Direalisasikan di pos pembiayaan.

Sumber: RAPBN, 2019 BISNIS/TRI UTOMO

itu tahun depan diproyeksikan harga BBM akan meningkat. Pasalnya, dengan penurunan subsidi jika tidak diikuti dengan kenaikan harga, akan semakin membebani Pertamina. Apalagi saat ini masih banyak guncangan eksternal.

"Maka sebenarnya yang moderat 10% . Memang dampaknya terhadap *out put* negatif, tapi harus dilihat juga bahwa yang memicu defisit neraca perdagangan yang cukup besar saat ini adalah defisit di migas," ujarnya.

Menurutnya, apabila dipotong gradual, dimulai sekitar 10%, kurang lebih kontraksi *output*-nya sekitar 0,08% dan penurunan pendapatan rumah tangga 0,09%, lalu tenaga kerja yang menjadi pengangguran akan bertambah sekitar 0,04%.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. menilai arah kebijakan pemerintah ke depan harus lebih memikirkan pada energi alternatif, bukan lagi bergantung pada energi migas.

"Menurut saya arah kebijakan pemerintah ke depan seharusnya lebih memikirkan pada pemberian subsidi kepada energi alternatif, karena kita saat ini bukan lagi produsen minyak, separuh BBM kita impor. Jadi menurut saya itu lebih penting, dari pada sekadar angka subsidi energi yang diturunkan," ujarnya kepada *Bisnis*, Jumat (19/10).

Namun demikian, apabila melihat angka subsidi energi pada postur sementara di RAPBN 2019, ada kemungkinan bisa membengkak, walupun ada dana cadangan Rp18,5 triliun yang bisa digunakan sebagai talangan kalau subsidi meningkat.

David menambahkan, apabila melihat dari angka subsidi yang dialokasikan, diproyeksikan harga BBM ke depan bakal meningkat. "Dulu awal-awal, subsidi pernah di bawah Rp100 triliun tapi kan *pelan-pelan* naik lagi. tahun ini sebagian juga *of budget*, kan sebagian ditanggung Pertamina," ujarnya. □